



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

TAHUN 2026

RENCANA KERJA RENJA



**PERANGKAT
DAERAH**

**Jl. Pahlawan No.21 Temanggung Telp (0293) 49112 Fax. (0293) 492421
kode pos 56226 Email : dpu@temanggungkab.go.id
website : dpupr.temanggungkab.go.id**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

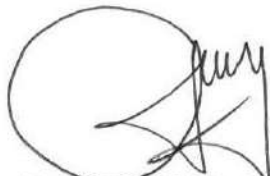
RENJA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



HANA AFIFAH, S.T.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19940822 202202 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan Rencana satu tahun ke depan dalam mencapai suatu tujuan yaitu mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalani roda pemerintahan khususnya dalam urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang maka diperlukan suatu perencanaan yang terpadu dan terarah.

Perencanaan yang terpadu dan terarah tersebut perlu ditunjang oleh beberapa misi yang dijabarkan dalam tujuan, program, kebijakan, untuk mencapai sasaran yang tepat. Langkah – langkah yang perlu diambil tersebut terangkum dalam suatu Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2026.

Temanggung, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	42
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	72
2.4 <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD	74
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	91
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	93
2.7 Penghargaan	94
BAB III	95
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	95
3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional	95
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	99
BAB IV	105
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	105
4.1. Program dan Kegiatan	105
BAB V	128
PENUTUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	14
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	27
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	43
Tabel 2. 4 Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	54
Tabel 2. 5 Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi.....	55
Tabel 2. 6 Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik	56
Tabel 2. 7 Luas Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik.....	56
Tabel 2. 8 Infrastruktur Jaringan Irigasi	57
Tabel 2. 9 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	58
Tabel 2. 10 Rekap Capaian Air Minum Semester 1 Tahun 2025.....	59
Tabel 2. 11 Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	60
Tabel 2. 12 Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung ...	61
Tabel 2. 13 Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung	62
Tabel 2. 14 Persentase Terbangunnya Gedung Pemerintah	63
Tabel 2. 15 Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap	64
Tabel 2. 16 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	65
Tabel 2. 17 Panjang Jalan Berdasarkan Tipe Perkerasan	65
Tabel 2. 18 Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.....	66
Tabel 2. 19 Rekapitulasi Kondisi Jembatan Tahun 2025 Triwulan Ii.....	67
Tabel 2. 20 Rekapitulasi Laporan Jalan Dengan Lebar.....	69
Tabel 2. 21 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang ..	71
Tabel 2. 22 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026.....	75
 TABEL 3 1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, TARGET KINERJA.....	 101
 TABEL 4. 1 PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 106
TABEL 4. 2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

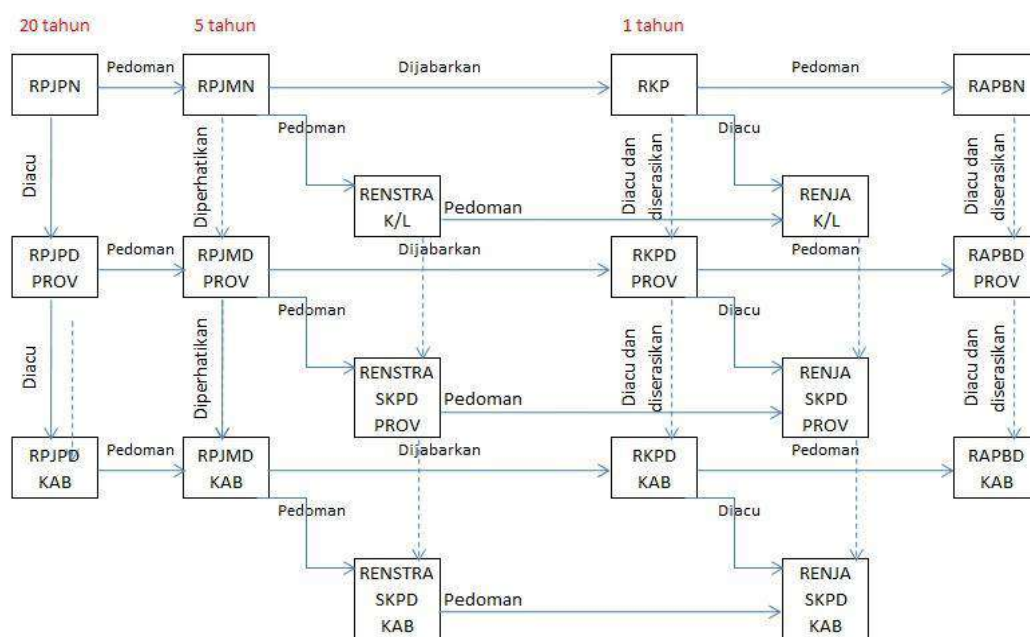
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan

tahun 2025;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun Pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				43.439.862.572		229.994.707.422	108.713.259.480		108.240.664.541
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.963.362.572		13.510.907.838	13.691.207.894		13.366.749.524
		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100		100			100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia			1.500.000					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.500.000	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu			10.040.491.618					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	122	10.040.491.618	1.464	11.441.666.338	11.621.968.394	1.464	11.415.340.207

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.000.000					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	10.000.000	12	9.967.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	30.000.000	48	30.000.000	30.000.000	48	29.712.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	24	20.000.000	20.000.000	24	19.997.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	20.000.000	12	70.000.000	70.000.000	12	56.144.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	84.980.000	84.980.000	12	84.817.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				645.370.954					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000	36	90.000.000	90.000.000	36	87.578.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	545.370.954	12	1.499.261.500	1.499.261.500	12	1.399.993.279

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.000.000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	136.000.000	52	150.000.000	150.000,000	52	148.227.927
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	51	10.000.000	57	15.000.000	15.000.000	57	14.993.211
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	8	100,000,000	100,000,000	8	99,977,450
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				3.063.000.000		28,263,600,000	23,654,036,000		21,520,625,723
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	59,26						
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%			59,32			59,36	
		Cakupan area layanan daerah irigasi	%			97,90			98,67	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000					
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	3	150.000.000					

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.913.000.000					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,016	150.000.000	18,19 7	14.258.985.000	8.285.236.082	22,24 6	7.639.343.100
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	859,4 3	2.500.000.000	819,9 7	2.187.002.800	2.147.002.800	905,9 9	2.128.908.518
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	3	100.000.000					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	163.000.000	4	300.000.000	225.000.000	4	221.290.950
	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Unit	0	0	1	3.300.000.000	110.000.000	1	107.334.373

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				275.000.000		9.929.055.750	8.645.297.000		8.233.015.344
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,02						
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31,14						
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13						
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	100		100			100	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%			95,50			96,47	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				275.000.000					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	Dokumen	5	125.000.000					

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	150.000.000	1	400.000.000	164.239.000	1	160.294.300
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	SR			1.254	9.329.055.750	8.281.058.000	1.254	7.874.752.745
	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Unit SPAM yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama	unit			7	200.000.000	200.000.000	7	197.968.299
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.088.000.000		1.850.000.000	1.351.000.000		1.222.830.605
		Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69,25						
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%			69,04			69,15	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.088.000.000					
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	1	688.000.000	3	1.450.000.000	951.000.000	3	825.300.698

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	6	400.000.000					
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	Sistem drainase perkotaan			1	400.000.000	400.000.000	1	397.529.907
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				2.245.000.000		16.928.046.000	4.900.000.000		4.465.135.047
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,25		100			93,42	
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64,64						
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				2.245.000.000					
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	2	1.750.000.000					

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	1	370.000.000					
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dikendalikan di Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	80	125.000.000	76	200.000.000	200.000.000	71	157.154.191
	Pembangunan, Pelestarian Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			2	16.728.046.000	4.700.000.000	2	4.307.980.856

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.733.000.000		3.210.000.000	2.820.000.000		2.737.450.378
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,63		62,00			66,66	
		Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,13						
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.733.000.000					
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan	2	4.733.000.000					
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan			7	3.210.000.000	2.820.000.000	7	2.737.450.378

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				20.060.000.000		60.930.827.100	34.203.168.000		32.407.370.581
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,85		89,29			88,92	
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,37		93,75			94,36	
		Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22,62		18,61			22,59	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				20.060.000.000					
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1	100.000.000					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	451.893.100	207.061.000	1	194.541.919
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	650,476	150.000.000		667.000.000	300.000.000	2	289.301.390
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	20	8.000.000.000	10	5.000.000.000	3.890.000.000	12,1	3.806.193.095
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1,45	4.258.000.000	3,5	10.813.000.000	4.231.500.000	3,74	4.011.877.171
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	0,524	10.050.000.000	1.600.000.000	0,524	1.535.962.907

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	0,39	4.443.000.000	6,28	8.032.000.000	10.875.500.000	6,28	10.465.683.924
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	200.000.000	6,41	500.000.000	575.000.000	6,41	519.570.786
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	0,661	2.809.000.000	3	7.344.000.000	9.359.982.000	3,35	8.847.297.710
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM			0,400	2.500.000.000	660.000.000	1	536.334.150
	Pematauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	KM			0,05	11.914.684.000	200.000.000	0,050	194.853.073
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M			7,62	800.000.000	350.000.000	11,11	275.840.280
	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M			27	2.858.250.000	1.954.125.000	41,9	1.729.914.176
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya	jumlah unit infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang terbangun	unit			6		8.000.000.000	3	4.805.090.105

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				62.500.000					
		Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	%	100						
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				62.500.000					
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	30	62.500.000	-	-	-		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				950.000.000		629.974.000	950.000.000		944.700.221
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Tata Ruang	%	90,38		89,50			90,18	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	%	50,01						
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				200.000.000					
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000					

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000					
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	600.000.000					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen			3	400.000.000	750.000.000	3	747.562.245
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen			1	129.974.000	100.000.000	1	99.555.150
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	150.000.000		100.000.000	100.000.000	1	97.582.826

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				44,329,054,656		12,448,481,390	15,082,000,547		3,335,794,203		6,947,265,482		
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100			100		100		100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41,335,066,976		10,474,462,090	13,352,149,647		3,040,212,127				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	36	41,335,066,976	1,464	10,474,462,090	13,352,149,647	366	3,040,212,127	732	6,207,399,210	50	46.49
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						214,978,500	110,958,000		15,935,012				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	84,770,000	12	10,000,000	7,000,000	3	0	6	0	50	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	89,999,550	48	30,000,000	22,275,000	12	2,007,012	24	4,518,012	50	20.28
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	73,998,850	24	20,000,000	12,000,000	6	2,758,000	12	6,043,700	50	50.36

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	36	180,000,000	12	70,000,000	37,200,000	3	5,605,000	6	9,487,500	50	25.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	36	200,000,000	12	84,978,500	32,483,000	3	5,565,000	6	10,180,297	50	31.34
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,143,991,600		1,494,040,800	1,331,523,400		212,604,182				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	36	390,000,000	12	90,000,000	90,000,000	9	16,788,818	18	36,635,022	150	40.71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	36	1,753,991,600	12	1,404,040,800	1,241,523,400	3	195,815,364	6	585,085,054	50	47.13
		Honor security, OB, sopir												
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				849,996,080		265,000,000	287,369,500		67,042,882				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	449,998,780	52	150,000,000	177,419,500	13	40,994,632	26	61,788,437	50	34.83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	70,000,000	57	15,000,000	9,950,000	14	220,000	28	300,000	49	3.02
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	329,997,300	8	100,000,000	100,000,000	2	25,828,250	4	25,828,250	50	25.83

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				40,804,250,000		9,764,704,000	1,757,697,200		234,201,940		241,513,940		
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	59,26										
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59.52		59.37			59.36		59.36		99.98	
		Cakupan area layanan daerah irigasi	%	97.97		97.90			98.67		98.67		100	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				248,000,000									
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air berfungsi dengan baik, pembagian kebutuhan air untuk irigasi optimal		6	150,000,000									
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, petani pemakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		3	58,000,000									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan TKPRD		2	40,000,000									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40,556,250,000		9,764,704,000	1,757,697,200		234,201,940				
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Doku men	2	400,000,000									
	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendu ng	1	12,302,859,000	1	1,212,000,000	546,027,400	0	250,000	0	3,072,000	-	0.56
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3	22,140,018,000	18.197	8,052,704,000	0			0	0	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	6	5,713,373,000	819.97	500,000,000	1,211,669,800	0	233,951,940	0	238,441,940	-	19.68

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				20,361,864,000		9,081,058,000	109,713,000		6,582,000		7,996,000		
		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	59,02										
		Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	31,14										
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13										
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100		100			0		-		0	
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	96		95.70			97.65		97.65		100	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				20,361,864,000		9,081,058,000	109,713,000		6,582,000				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Data AMPL 7 Kecamatan di Kabupaten Temanggung, tersusunnya DED air bersih		1	25,000,000									
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM di kawasan perdesaan menggunakan dana DAK, Terasilitasinya kegiatan DAK Air Minum		3	19,256,864,000									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	SR	1	900,000,000	0	8,981,058,000	19,304,000	0	0	0	1,114,000	-	5.77
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kegiat an			1	100,000,000	90,409,000	0	6,582,000	0	6,882,000	-	7.61
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupten/Kota	Jumlah Unit SPAM yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama	unit	2	150,000,000									
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Kelembagaan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang Meningkatkan Kinerjanya		1	30,000,000									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3,238,828,104		200,000,000	285,577,800		60,633,384		60,633,384		
		Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,25		69.34			69.15		69.15		99.73	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3,238,828,104		200,000,000	285,577,800		60,633,384				
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem draina se perkota an	1	1,500,000,000									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	Sistem drainase perkotaan			1	200,000,000	285,577,800	0	60,633,384	0	60,633,384	-	21.23
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	unit	3	904,720,404									
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	6	834,107,700									
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				10,053,000,000		200,000,000	1,041,688,258		22,550,000		35,060,000		
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,25										
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64,64										
		Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	100		100			0		0		0	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				10,053,000,000		200,000,000	1,041,688,258		22,550,000				

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan	Paket			1		928,344,338	0	400,000	0	400,000	-	0.04
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	doku men	3	350,000,000	50	200,000,000	113,343,920	12	22,150,000	24	34,660,000	48	30.58
	Pembangunan, Pelestarian Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	doku men											
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Adanya produk perencanaan (DED) Gedung yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Temanggung, Terpelihara dan Terbangunnya Gedung-Gedung Pemerintah di Wilayah Kabupaten Temanggung		2	4,875,000,000									
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersusunnya perda bangunan gedung		2	50,000,000									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		
									II						
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya dan Terehabilitasinya bangunan gedung kantor pada area terpilih, Tertatanya Lingkungan Mapolres Temanggung		2	4,778,000,000										
														Sangat Rendah	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				7,077,859,000		200,000,000	1,898,828,500		740,000		1,488,084			
		Persentase trotoar kondisi baik	%	68,63		73.97			68.61		68.61		92.75		
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,13											
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota				7,077,859,000		200,000,000	1,898,828,500		740,000					
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan			7	200,000,000	1,898,828,500	0	740,000	0	1,488,084	-	0.08	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Produk DED/Perencanaan Pembangunan Trotoar		2	3,500,000,000										
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan trotoar di wilayah kabupaten Temanggung		3	3,577,859,000										

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				361,674,609,64 6		22,697,649,250	23,007,252,700		1,289,229,625		1,406,717,472		
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,85		89.50			86.11		86.11		96.21	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94,37		94.00			93.18		93.18		99	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,62		19.61			22.59		22.59		100	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				361,674,609,64 6		22,697,649,250	23,007,252,700		1,289,229,625				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Doku men	3	1,000,000,000			99,525,000	0	429,563	0	1,059,563	-	1.06
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM											
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	3	69,869,841,800	0.40	1,345,000,000	517,817,800	0	1,522,500	0	1,892,500	-	0.37
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	3	14,685,718,000	0.140	360,000,000	347,287,600	0	1,087,000	0	2,231,000	-	0.64
	Pematauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	KM											

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	KM	3	95,614,148,000	1.125	14,092,982,000	5,746,064,000	0	100,805,970	0	101,102,970	-	1.76
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	6	1,000,000,000	1	118,667,250	197,147,900	0	290,000	0	290,000	-	0.15
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	2	800,000,000									
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM					147,650,900	0	0	0	0	-	-
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM			0.64	3,681,000,000	11,968,418,700	0	55,015,629	0	55,860,629	-	0.47
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	6	20,005,464,000	10	3,100,000,000	3,983,340,800	0	1,130,078,963	0	1,244,280,810	-	31.24
	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	unit											
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur		1	38,050,000,000									
	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi jalan		3	24,728,000,000									
	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan		2	2,400,000,000									
	Penggantian Jembatan	Terlaksananya kegiatan penggantian jembatan		2	92,325,437,846									
	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya pelebaran jembatan		2	800,000,000									
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		1	396,000,000									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				120,000,000			14,469,600		600,000		600,000		
		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100		0			0		0		0	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				120,000,000			14,469,600		600,000				
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			3	120,000,000			14,469,600	0	600,000	0	600,000	-	4.15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				689,999,600		300,000,000	221,448,950		24,115,500		32,177,000		
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	90,38		89.51			90.19		90.19		100	
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	50,01										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				403,241,000		200,000,000	133,665,850		21,127,000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	doku men	2	228,299,900	3	200,000,000	133,665,850	0	21,127,000	0	28,106,000	-	21.03
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	doku men	3	174,941,100									

NO	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA 2026		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN TH. 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
									II					
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000									
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	doku men											
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa, Terwujudkanya sisten informasi penataan ruang Pemkab. Temanggung		1	80,000,000									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				206,758,600		100,000,000	87,783,100		2,988,500				
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penataan Ruang	doku men			1	100,000,000	87,783,100	0	2,988,500	0	4,071,000	-	4.64
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya kegiatan TKPRD		3	206,758,600									
JUMLAH					488,229,465,006		54,891,892,640	43,418,676,555		4,973,846,652		8,733,451,362	26	15.17

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Persentase infrastruktur kondisi baik; dan
 - b. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase jaringan irigasi kondisi baik
 - b. Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi;
 - c. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum;
 - d. Persentase saluran drainase kondisi baik;
 - e. Persentase Trotoar Kondisi Baik;
 - f. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap;
 - g. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik;
 - h. Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan;
 - i. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Pembangunan Bendung Irigasi;
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - d. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - e. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - f. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;

- g. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
- h. pelebaran Jalan Menuju Standar;
- i. Rekonstruksi Jalan;
- j. Rehabilitasi Jalan;
- k. Pemeliharaan Berkala Jalan;
- l. Pemeliharaan Rutin Jalan;
- m. Pembangunan Jembatan;
- n. Penggantian Jembatan; dan
- o. Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangat memuaskan** yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik; dan
Capaian Kinerja : 99,33 % dengan predikat sangat tinggi
2. Meningkatnya persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang.
Capaian Kinerja : 100,00 % dengan predikat sangat tinggi

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)														
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84.71	84.47	84.64	84.86	85.07	84.08		99.33	√			
2	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89.56	89.50	89.51	89.52	90.18	90.18		100	√			
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)													
	1) Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59.36	59.32	59.37	59.42	59.36	59.36		99.98	√			
	2) Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	98.32	97.90	97.90	97.90	98.67	98.67		100	√			
2	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
	1) Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	95.95	95.50	95.70	96.00	97.65	97.65		100	√			
	2) Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	100	100	100	100.00	0		0				√

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase													
	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69.21	69.04	69.34	69.64	69.15	69.15		99.72	√			
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya													
	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	66.66	73.93	73.97	74.01	68.66	68.61		92.75	√			
5	Program Penataan Bangunan Gedung													
	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	n.a	100	100	100	93.42	0		0				√
6	Program Penyelenggaraan Jalan													
	1) Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89.16	89.29	89.50	89.75	88.92	86.11		96.21	√			
	2) Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94.36	93.75	94.00	94.25	94.36	93.18		99.12	√			
	3) Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	n.a	18.61	19.61	20.61	22.59	22.59		100	√			
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													
	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89.56	89.50	89.51	89.52	90.18	90.18		100	√			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN						100				
JUMLAH IKUPD			2	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						99.67	2	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			11	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						80.71	9	0	0	2
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH			14	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH						93.46	11	0	0	0

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran skala penilaian peringkat kinerja sangat tinggi ada 2 terdiri dari:
 - a. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah antara lain:
 - a) Adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir; dan
 - b) Kondisi eksisting infrastruktur tingkat kerusakan lebih tinggi dari kemampuan anggaran yang tersedia.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut dengan penambahan anggaran dari beberapa sumber dana (DAK, DAU dan Bankeu Provinsi).
 - b. Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah antara lain:
 - a) Telah ditetapkan Perda RTRW pada tanggal 30 Mei 2024;
 - b) Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan; dan
 - c) Penambahan luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang;
 - b) Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c) Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Mempercepat pengesahan Perbup RDTR;
 - b) Komunikasi aktif dengan Kementerian ATR;
 - c) Memfasilitasi kegiatan Forum Penataan Ruang (lintas OPD); dan
 - d) Memberi surat teguran kepada pelanggar Tata Ruang.

2. Capaian indikator program dengan skala penilaian peringkat kinerja sangat tinggi ada 9 (sembilan) indikator yang terdiri dari:
 - a. Persentase jaringan irigasi kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain :
 - a) Terbangunnya jaringan irigasi yang baik;
 - b) Rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa titik lokasi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain :
 - a) Bencana alam;
 - b) Kondisi eksistitng infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi, pemeliharaan; dan
 - c) Alih fungsi lahan pertanian.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator antara lain :
 - a) Tanggap bencana pada daerah yang rawan bencana dengan pencegahan dini;
 - b) Pengendalian alih fungsi lahan; dan
 - c) Koordinasi yang baik antara masyarakat dengan stakeholder dan instansi terkait pengendalian alih fungsi lahan dan pencegahan bencana.
 - b. Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penambahan luas area layanan DI;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; dan

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

c. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain:
 - a) Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait;
 - b) Swadaya masyarakat;
 - c) Dana Pemerintah;
 - d) Kelompok pengelola SPAM;
 - e) Dana CSR;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat
 - b) Adanya ego masing-masing desa/dusun dalam hal pemanfaatan sumber air minum;
 - c) Konflik kepentingan antara Pengelola SPAM dan petani;
 - d) Pendataan rinci di tingkat kelurahan/desa dan tidak memiliki akses langsung ke tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh data kependudukan.
 - e) Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai air minum layak;
 - f) Masih ada beberapa SPAM yang belum terkelola dengan baik;
 - g) Belum ada CSR;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Pembinaan SPAM ke desa;
 - b) Pembentukan unit BUMDES bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSAM;
 - c) Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih;
 - d) Mengusulkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- e) Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan;
 - f) Mendorong peningkatan kerjasama antar desa;
 - g) Melakukan monev KPSPAM; dan
 - h) Mengupayakan dana CSR untuk SPAM.
- d. Presentase saluran drainase kondisi baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain:
 - a) Adanya tuntutan daerah bebas banjir;
 - b) Adanya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan/kawasan yang rawan banjir.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Terpenuhinya pembangunan drainase kawasan perkotaan; dan
 - b) Terpenuhinya penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan OP sistem drainase perkotaan.
- f. Persentase Trotoar Kondisi Baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain:
 - a) Terdapat hasil musrenbang yang telah disetujui stakeholder terkait;
 - b) Adanya alokasi dana APBD;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Tidak adanya dukungan masyarakat untuk pembebasan lahan untuk pembangunan trotoar;
 - b) Pembebasan lahan yang tidak lancar;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Sosialisasi kepada masyarakat
 - b) Usulan dana ke pemerintah provinsi/pusat.

g. Persentase Jalan Kondisi Mantap

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain:
 - a) Adanya program preservasi jalan dan jembatan yang meliputi 6 wilayah UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI;
 - b) Pembangunan jalan pada beberapa titik lokasi;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Terjadinya kenaikan harga material yang cenderung drastis;
 - b) Masih adanya ruas jalan yang masih dibawah standar;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Percepatan dalam penentuan/penyesuaian harga;
 - b) Perencanaan dilaksanakan pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (n-1);

h. Persentase Jembatan dalam kondisi baik

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keterpaduan tujuan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang merata;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Terjadinya kenaikan harga material yang cenderung drastis;
 - b) Masih adanya ruas jembatan yang masih dibawah standar;
 - c) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan/rehabilitasi jembatan yang membutuhkan biaya tinggi sedangkan jumlah total jembatan kewenangan kabupaten yang perlu ditangani sejumlah 337 unit.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Percepatan dalam penentuan/penyesuaian harga;
 - b) Perencanaan dilaksanakan pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (n-1);
 - c) Prioritas pembangunan infrastruktur jembatan.

- i. Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kebutuhan masyarakat akan terbangunnya infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Masih banyak ruas jalan di Kabupaten Temanggung yang lebarnya belum sesuai standar;
 - b) Keterbatasan anggaran;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengupayakan anggaran melalui sumber dana lain seperti DAK dan Bantuan Provinsi.
- j. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah antara lain:
 - a) Telah ditetapkan Perda RTRW pada tanggal 30 Mei 2024;
 - b) Luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sudah disesuaikan dengan Berita Acara Kesepakatan; dan
 - c) Penambahan luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang;
 - b) Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c) Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Mempercepat pengesahan Perbup RDTR;
 - b) Komunikasi aktif dengan Kementerian ATR;
 - c) Memfasilitasi kegiatan Forum Penataan Ruang (lintas OPD); dan

- d) Memberi surat teguran kepada pelanggar Tata Ruang.
3. Capaian indikator program dengan status skala penilaian peringkat kinerja sangat rendah ada 2 (dua) indikator terdiri dari:
- a. Persentase terbangunnya gedung pemerintah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut antara lain:
 - a) Adanya usulan pembangunan gedung baru dan instansi pemerintah;
 - b) Alokasi dana APBD;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain:
 - a) Adanya beberapa bangunan gedung yang sudah tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018;
 - b) Terbatasnya lokasi calon bangunan gedung; dan
 - c) Belum terlaksananya pekerjaan konstruksi pada triwulan II karena pekerjaan masih dalam tahap lelang.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut antara lain:
 - a) Mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan gedung yang sudah tidak sesuai standard;
 - b) Melakukan percepatan pelaksanaan pada triwulan selanjutnya agar pekerjaan selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.
 - b. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari merupakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang harus dilaksanakan pemerintah;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari belum merata di seluruh lapisan masyarakat; dan

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan konstruksi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum agar pekerjaan dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pekerjaan Umum dan Data Pokok Bidang Penataan Ruang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pekerjaan Umum

a. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

Meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah berakses air minum layak.

Persentase infrastruktur kondisi baik adalah rata-rata dari semua variabel diatas. Untuk mengukur persentase infrastruktur kondisi baik dapat digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.

Kondisi infrastruktur kondisi baik selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun		Capaian Triwulan I 2025
		2024	2025	
1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	88,92	87,47	97,73
2	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	94,36	93,18	93,18
3	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	59,36	59,36	59,36
4	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	97,65	97,65	97,65
5	Jumlah	340,29	337,66	337,66
6	Rata - Rata	85,07	84,41	84,41

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Indikator sasaran Persentase Infrastruktur Kondisi Baik terdiri dari 10 indikator program yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik. Indikator program tersebut antara lain:

1. Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)

Cakupan area layanan daerah irigasi di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Rumus cakupan area layanan daerah irigasi adalah jumlah areal layanan daerah irigasi dibagi jumlah luas total areal daerah irigasi dikalikan 100 %. Cakupan area layanan daerah irigasi dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi

Tahun	Daerah Irigasi (DI) Kabupaten			Capaian Triwulan I 2025 (%)
	Jumlah Area Layanan D.I	Jumlah Luas Total Areal D.I	%	
2024	17.411,55 Ha	17.708,78 Ha	98,32	100
2025	17.472,85 Ha	17.708,78 Ha	98,67	100

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Penyediaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Temanggung didukung kondisi alam yang berkontur miring dan mempunyai sumber daya air yang mencukupi. Sehingga walaupun masih ada saluran irigasi non teknis namun ketersediaan air irigasi masih mencukupi. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 17.708,78 Ha. Penambahan luasan tersebut karena pendataan asset irigasi di tahun 2021.

Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi

$$= \frac{\text{Jumlah area layanan DI}}{\text{Jumlah luas total areal DI}} \times 100\%$$

$$= \frac{17.472,85 \text{ Ha}}{17.708,78 \text{ Ha}} \times 100\% = 98,67 \%$$

2. Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu

kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pada Tahun 2019 ada perubahan satuan pada perhitungan irigasi berkondisi baik yaitu satuan luasan Hektar (Ha) dengan rumus jumlah keseluruhan areal irigasi yang kondisi baik dibagi jumlah total luas areal irigasi dikalikan 100 %. Pada tahun 2020 perhitungan menggunakan satuan unit agar lebih memudahkan dalam pelaporan di tahun selanjutnya. Oleh karena itu, kami tampilkan perhitungan luasan irigasi kondisi baik dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2. 6
Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten			
	Jumlah DI (unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Capaian (%)
2024	577	342,5	59,36	100
2025	577	342,5	59,36	100

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Tabel 2. 7
Luas Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Luas DI (Ha)	Kondisi Baik (Ha)	%
2024	17708,78 Ha	10512,17	59,36
2025	17708,78 Ha	10512,17	59,36

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Tabel 2. 8
Infrastruktur Jaringan Irigasi

NO	Data Komponen	2024	2025
1	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	859.429,49 m	859.429,49 m
2	Saluran Irigasi Terbangun (Lining Kanan Kiri)	233.590,2 m	233.590,2 m
3	Saluran Irigasi Sederhana (Tanah)	624.441,44 m	624.441,44 m
4	Persentase Saluran Irigasi Terbangun	27,41 %	27,41 %

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Pada triwulan II Tahun 2025, berdasarkan survey yang dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI, persentase jaringan irigasi terbangun yaitu 27,41% masih sama dengan kondisi tahun 2024.

3. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum

Rumah tangga berakses air bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Untuk memperoleh persentase rumah berakses air minum layak, dapat digunakan rumus jumlah rumah tangga terlayani air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Persentase rumah dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum

No.	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	268.376	268.376
2	Jumlah Rumah Tangga	274.845	274.845
3	Persentase (%)	97,65	97,65

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan akses air minum pada Triwulan II tahun 2025 adalah 97,65%, masih sama dengan kondisi akhir tahun 2024. Faktor meningkatnya capaian ini karena jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak bertambah 7.543 kepala keluarga (KK) yang terlayani dan memiliki akses air bersih. Data dukung cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Rekap Capaian Air Minum Semester 1 Tahun 2025

REKAP CAPAIAN AIR MINUM TRWILAH I TAHUN 2025															
KABUPATEN TEMANGGUNG															
NO	NAMA DESA	JUMLAH KK		SARANA AIR BERSIH										CAPAIAN (%)	
				PDAM		Perpipaan Pedesaan				Non Jaringan Perpipaan Terintegrasi (Sumur gali, Sumber mata air, KLU, HGU)	JUMLAH KK MENYUMI SARANA AIR MINUM LAYAK	JUMLAH KK MENYUMI SARANA AIR MINUM AMAN			
						Pamsimas	Kelompok	Mandiri							
				Mengalir 24 jam	Mengalir <24 jam	Mengalir 24 jam	Mengalir <24 jam	Mengalir 24 jam	Mengalir <24 jam	Mengalir 24 jam	Mengalir <24 jam			Belum Punya	AMAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	KECAMATAN BEJEN	7.599	0	0	1.332	719	3.302	1.596	619	0	31	7.599	5.253	0	100.00%
2	KECAMATAN BULU	16.952	1.502	0	2.335	265	6.196	324	3.443	875	1.559	16.499	11.974	453	97.33%
3	KECAMATAN GEMAWANG	11.820	177	0	1.783	372	2.629	1.165	1.681	2.021	1.693	11.521	6.093	299	97.47%
4	KECAMATAN KANDANGAN	17.971	2.613	0	679	2	2.913	1.147	3.135	301	7.130	17.920	6.727	51	99.72%
5	KECAMATAN JUMO	10.811	1.890	0	1.141	1.321	1.053	97	2.441	311	2.408	10.662	4.635	149	98.62%
6	KECAMATAN CANDIROTO	11.586	292	0	3.549	136	5.432	0	1.788	0	0	11.197	10.769	389	96.64%
7	KECAMATAN BANSAIR	8.398	0	0	2.146	250	1.825	132	703	61	3.120	8.237	4.674	161	98.08%
8	KECAMATAN KALORAN	16.210	2.490	0	1.749	0	5.525	0	477	0	5.026	15.267	7.751	943	94.18%
9	KECAMATAN KEDU	20.460	3.705	0	1.963	405	2.168	403	186	268	10.500	19.598	4.317	862	95.79%
10	KECAMATAN KLEDUNG	9.694	135	0	1.743	652	4.645	1.397	186	97	558	9.413	6.574	281	97.10%
11	KECAMATAN KRANGGAN	17.388	3.893	0	2.591	0	4.910	0	1.888	0	4.106	0	9.389	17.388	100.00%
12	KECAMATAN NGADIREJO	19.694	2.806	0	3.123	1.423	6.033	3.866	659	863	888	19.661	9.815	33	99.83%
13	KECAMATAN PARAKAN	18.206	7.277	0	1.556	0	3.738	0	1.862	0	3.773	0	7.156	18.206	100.00%
14	KECAMATAN PRINGSURAT	18.294	5.536	0	2.270	0	1.880	0	2.829	2.000	1.650	16.165	6.979	2.129	98.36%
15	KECAMATAN SELOPAMPANG	6.825	231	0	1.902	0	3.010	0	1.064	0	108	6.315	5.976	510	92.53%
16	KECAMATAN TEMANGGUNG	28.359	17.820	0	5	0	3.786	0	1.417	424	4.907	0	5.208	28.359	100.00%
17	KECAMATAN TEMBARAK	10.243	1.230	0	1.307	0	3.446	0	646	78	1.735	8.442	5.399	1.801	82.42%
18	KECAMATAN TLOGOMULYO	7.952	70	0	996	0	3.602	0	1.456	0	409	6.533	6.054	1.419	82.16%
19	KECAMATAN TRETEP	7.378	0	0	2.033	828	3.460	897	77	0	7.295	5.570	5.570	83	98.88%
20	KECAMATAN WONOBOYO	9.005	0	0	1.949	243	5.987	79	571	59	0	8.888	8.507	117	98.70%
	JUMLAH	274.845	52.445	0	38.585	6.616	75.540	11.103	27.128	7.358	49.601	268.376	193.608	73.633	97.65%
	JUMLAH PENDUDUK	817.483	52.445	0	38.585	6.616	75.540	11.103	27.128	7.358	49.601	268.376			
	PERBANDINGAN	2.97	19.08%								218.775	49.601	268.376	6.469	
		34.275	(aman)								79.60%	18.05%	97.65%	2.35%	100.00%
	JUMLAH RUMAH (sumber: Capil 2024 Kabupaten Temanggung)										(JP)	(BJP)	(layak)		274.845
	Jumlah Capaian Rumah yang terfasilitasi Air Minum														268.376

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

4. Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan, pengertian drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

Sedangkan indikator Persentase drainase kondisi baik adalah tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%. Tersedianya pelayanan sistem drainase merupakan ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-

struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Rumus untuk mendapatkan persentase saluran drainase kondisi baik adalah panjang jaringan drainase kondisi baik dibagi Panjang keseluruhan jaringan drainase skala kawasan/kota yang ada dikalikan 100%.

Tabel 2. 11
Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik

No.	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1	Panjang Jaringan Drainase Kondisi Baik	107,431	107,431
2	Panjang Keseluruhan Jaringan Drainase Skala Kawasan/Kota yang Ada	155,363	155,363
3	Persentase (%)	69,15	69,15

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 Tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten ada penyesuaian panjang drainase. Panjang drainase yang menjadi tanggung jawab DPUPR adalah 155,363 Km. Sedangkan saluran drainase kondisi baik triwulan II tahun 2025 adalah 107,431 km masih sama dengan kondisi saluran drainase pada akhir tahun 2024. Persentase saluran drainase kondisi baik adalah 69,15%, dengan target 69,04% dan capaian 100% dengan skala penilaian sangat tinggi .

5. Persentase Trotoar Kondisi Baik

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kereb. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut.

Panjang trotoar Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan panjang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Berikut panjang dan kondisi trotoar Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan I tahun 2025 berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s/d VI yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rumus persentase trotoar kondisi baik dihitung dengan rumus panjang trotoar kondisi baik dibagi panjang trotoar kabupaten dikalikan 100 %.

Tabel 2. 12
Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar
Kabupaten Temanggung

No.	Wilayah Kewenangan	Total Panjang Trotoar (m')	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m')	Panjang Trotoar Kondisi Rusak Ringan (m')
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	30,569.31	18,935.11	1,208.10
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	18,386.00	17,123.00	
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	12,013.00	5,400.00	4,532.00
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	8.762,00	6,509.00	703.00

No.	Wilayah Kewenangan	Total Panjang Trotoar (m')	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m')	Panjang Trotoar Kondisi Rusak Ringan (m')
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	4.541,00	2,804.00	
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	1.700,70	1,349.01	
	TOTAL	75,972.01	52,121.01	6,443.10

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tabel 2. 13
Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m)	52,121.01	52,121.01
2	Panjang Trotoar Kabupaten (m)	75,972.01	75,972.01
3	Persentase (%)	68.61	68.61

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada triwulan I Tahun 2025 persentase trotoar kondisi baik belum mencapai target disebabkan karena eksisting trotoar kondisi rusak tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Persentase trotoar kondisi baik pada triwulan I tahun 2025 68,61% dengan target 73,93% sehingga capaian indikator program Penataan Bangunan dan Lingkungannya tercapai 92,80% dengan skala penilaian sangat tinggi.

6. Persentase Terbangunnya Gedung Pemerintah

Persentase terbangunnya gedung pemerintah dihitung dengan rumus jumlah jumlah gedung pemerintah yang terbangun dibagi Jumlah Pengesahan DED Gedung Pemerintah dikalikan 100 %.

Tabel 2. 14
Persentase Terbangunnya Gedung Pemerintah

No.	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1	Jumlah Gedung Pemerintah yang Terbangun	71	0
2	Jumlah Pengesahan DED Gedung Pemerintah	76	0
3	Persentase (%)	93,42	0

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Akan tetapi indikator persentase terbangunnya gedung pemerintah ini hanya menghitung gedung instansi vertikal yang dibangun dengan anggaran Pemerintah Daerah melalui DPUPR sebagai dinas teknis.

Pada triwulan II tahun 2025 belum tersedia data jumlah gedung pemerintah yang terbangun dan total DED gedung pemerintah yang disahkan karena pada triwulan II belum ada pekerjaan fisik dan masih dalam tahap lelang.

7. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan Kabupaten menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi baik dalam indikator ini adalah ruas

jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%).

Yang dimaksud persentase jalan kondisi mantap pada indikator ini meliputi kondisi baik dan sedang.

Rumus untuk memperoleh angka persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap adalah dengan menjumlah panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang dibagi total panjang jalan kabupaten dikali 100%. Jalan kabupaten dengan kondisi mantap ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15
Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap

No.	Uraian	TAHUN	
		2024	2025
1	Panjang Jalan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Kondisi Sedang) (km)	578,40	560,12
2	Panjang Jalan Kabupaten (km)	650,476	650,476
3	Persentase (%)	88,92	86,12
4	Capaian (%)	100	96,21

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan survey awal oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s.d Regional VI pada triwulan II tahun 2025, persentase jalan kabupaten kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) mengalami penurunan kondisi 2,8% dari kondisi akhir tahun 2024. Menurunnya persentase jalan kabupaten kondisi mantap diakibatkan oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan kerusakan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak

stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Data laporan hasil survei kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
			RUSAK BERAT	TELFORD
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	63.506	18.915	7.934
			26.849	
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi		

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 2. 17
Panjang Jalan Berdasarkan Tipe Perkerasan

ASPAL (KM)	BETON (KM)	TELFORD (KM)	TANAH (KM)	TOTAL (KM)
602.827	39.715	7.934	0.000	650.476
92.67%	6.11%	1.22%	0%	

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

8. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan

bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

Yang dimaksud Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan struktur atas dan struktur bawahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan Jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Untuk memperoleh persentase jembatan kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus sebagai berikut jumlah jembatan kabupaten kondisi baik (unit) dibagi Jumlah total jembatan kabupaten (unit) dikalikan 100%.

Tabel 2. 18
Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2024	337	318	94,36
2025	337	314	93,18

Sumber: Data Pokok DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator program persentase jembatan kondisi baik pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu 93,18%, menurun 1,18% dari realisasi tahun 2024. Dengan jumlah jembatan kondisi baik 314 unit dari total seluruh jembatan kewenangan kabupaten yaitu 337 unit. Apabila dibandingkan dengan target awal RPD 2024-2026, capaian indikator program persentase jembatan kabupaten kondisi baik tercapai 99,13% dengan skala penilaian sangat tinggi. Penurunan persentase jembatan

kondisi baik ini disebabkan kerusakan struktur jembatan. Kerusakan struktur jembatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

2. Beban berlebih (overload);
3. Perencanaan atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar dan spesifikasi;
4. Penggunaan material yang tidak sesuai dengan persyaratan;
5. Faktor lingkungan yang belum diantisipasi.

Tabel 2. 19
Rekapitulasi Kondisi Jembatan Tahun 2025 Triwulan II

KEADAAN JEMBATAN	LAPORAN TRIWULAN IV		LAPORAN TRIWULAN I	
	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
Baik	318	94.36	314	93.18
Rusak	19	5.64	23	6.82
JUMLAH	337		337	

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

9. Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan harus memenuhi persyaratan teknis jalan. Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan

diberlakukan untuk jalan umum dalam pembangunan jalan baru dan preservasi jalan. Perencanaan teknis jalan dilakukan berdasarkan pada kriteria perencanaan teknis jalan agar jalan yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis jalan. Persyaratan Teknis Jalan terdiri atas:

- a. kecepatan rencana;
- b. lebar badan Jalan;
- c. kapasitas Jalan;
- d. Jalan masuk;
- e. persimpangan sebidang;
- f. Bangunan Pelengkap Jalan;
- g. perlengkapan Jalan;
- h. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
- i. ketidakterputusan.

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan pada Pembangunan Jalan Baru terdiri atas:

- a. fungsi Jalan;
- b. kelas Jalan;
- c. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- d. dimensi Jalan;
- e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan;
- f. persyaratan geometrik Jalan;
- g. konstruksi Jalan;
- h. konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan;
- i. perlengkapan Jalan;
- j. ruang bebas Jalan; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

Fungsi Jalan terdiri atas:

- a. Jalan arteri primer;
- b. Jalan kolektor primer;
- c. Jalan lokal primer;
- d. Jalan lingkungan primer;
- e. Jalan arteri sekunder;
- f. Jalan kolektor sekunder;
- g. Jalan lokal sekunder; dan
- h. Jalan lingkungan sekunder.

Kriteria Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan dijabarkan lebih rinci pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

Tabel 2. 20
Rekapitulasi Laporan Jalan Dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan Laporan Tahun 2025 Triwulan II

NO.	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	PANJANG RUAS (KM)	
			LEBAR SUDAH STANDAR	LEBAR BELUM STANDAR
1	2	3	4	5
I	UPT WILAYAH TEMANGGUNG	62.992	26.727	36.265
II	UPT WILAYAH PARAKAN	102.900	37.166	65.734
III	UPT WILAYAH NGADIREJO	158.770	27.570	131.200
IV	UPT WILAYAH KRANGGAN	127.784	5.230	122.554
V	UPT WILAYAH KANDANGAN	127.750	40.955	86.795
VI	UPT WILAYAH TEMBARAK	70.280	9.285	60.995
	JUMLAH	650.476	146.933	503.543
	PERSENTASE		22.59%	77.41%

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

2. Data Pokok Bidang Penataan Ruang

a. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

Perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang. Perubahan cara perhitungan juga didasari oleh kondisi diatas, diharapkan angka yang ada akan lebih menggambarkan kondisi Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031.

Rumus perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Perbandingan persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW di Kabupaten Temanggung dari tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 21
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1	Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	77.987,4	77.987,4
2	Jumlah Luasan Wilayah Kabupaten Temanggung	86.483	86.483
3	Persentase %	90,18%	90,18%

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari tahun 2020 s.d Triwulan I Tahun 2025 terus meningkat. Hal tersebut karena pada tahun 2024 jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan luasan wilayah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 yaitu 86.483 Ha.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 terdapat penambahan luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang berupa luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang seluas 15,03 Ha. Sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang pada triwulan IV tahun 2024 adalah 77.987,4 Ha.

Target tahun 2024 dapat dicapai karena ada faktor pendukung peningkatan kinerja indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini antara lain:

- a. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan; dan
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain:

- a. Peningkatan kegiatan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya ketegasan dalam tindakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan tata ruang; dan
- c. Memberikan sosialisasi peraturan mengenai RTRW secara bertahap kepada masyarakat maupun stakeholder terkait.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari 2 indikator sasaran terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu:

Indikator Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

Hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir; dan
- b) Kondisi eksisting infrastruktur tingkat kerusakan lebih tinggi dari kemampuan anggaran yang tersedia.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, antara lain:
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
Tuntutan kinerja yang semakin tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi polemik yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Mutasi pegawai dan purna tugas pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan infrastruktur semakin menipis, sedangkan tuntutan kinerja semakin tinggi.
 - Keterbatasan anggaran daerah
Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, jaringan air bersih) yang sudah tidak memenuhi standar membutuhkan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan/rehabilitasinya. Sedangkan anggaran daerah belum mampu untuk meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan.
 - Kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung
Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi, dengan pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Karena kondisi tersebut menyebabkan :
 - a. Kondisi wilayah yang rawan genangan di musim penghujan resiko terjadinya kerusakan jalan (masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu antara 20 – 40% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase)
 - b. SPAM jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan yang berkontur miring;
 - Pelanggaran Tata Ruang masih terus terjadi hal ini disebabkan karena lemahnya penegakkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami sudah melakukan perencanaan dan evaluasi dengan memprioritaskan kegiatan yang sangat mendesak dengan butuh anggaran banyak. Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan mengirimkan proposal kegiatan untuk mendapatkan anggaran baik dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Sedangkan permasalahan pada bidang Penataan Ruang, DPUPR Kabupaten Temanggung disarankan agar bertindak tegas terhadap pelanggaran ketentuan Tata Ruang dan segera menyelesaikan penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Rancangan Awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2026;
2. Tidak ada perubahan lokasi kegiatan maupun target kegiatan;
3. Terdapat penambahan pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2026.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.22 berikut

Tabel 2. 22
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tema nggung	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	12	Laporan	10.474.462.090	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tema nggung	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	12	Laporan	10.474.462.090	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tema nggung	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disusun tepat waktu	26	Dokumen	10.474.462.090	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tema nggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122	Orang/ bulan	10.474.462.090	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpenuhi Ketersediaannya	5	Paket	125.000.000	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpenuhi Ketersediaannya	5	Paket	130.000.000	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.000.000	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.000.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	30.000.000	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	30.000.000	
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen yang di cetak dan difotocopy	50	Dokumen	15.000.000	c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20.000.000	
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Persentase tamu yang dapat difasilitasi dengan baik	100	%	20.000.000	d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
e.	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tema nggung	Persentase penyiapan tempat rapat yang dapat difasilitasi dengan baik	100	%	50.000.000	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tema nggung	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	50.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tema nggung	Persentase Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tepat Waktu	100	%	447.032.000	3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tema nggung	Persentase Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tepat Waktu	100	%	980.841.426	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tema nggung	Jumlah kegiatan pembayaran telepon, air dan listrik	36	Kegiatan	90.000.000	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tema nggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tema nggung	Jumlah dokumen pembayaran jasa petugas keamanan, petugas kebersihan dan staf pendukung administrasi kantor	12	Dokumen	357.032.000	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tema nggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	880.841.426	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tema nggung	Persentase Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas yang Dilakukan Tepat Waktu Daerah yang Terpelihara	100	%	206.000.000	4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tema nggung	Persentase Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas yang Dilakukan Tepat Waktu Daerah yang Terpelihara	100	%	246.000.000	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tema nggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	200.000.000	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tema nggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	236.000.000	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tema nggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	6.000.000	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tema nggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung				150.000.000	1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung				150.000.000	
a.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Tema nggung	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	unit	150.000.000	a.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Tema nggung	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	unit	150.000.000	
2.	Pengemba ngan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi yang Dikelola	859.43	KM	2.750.000.000	1.	Pengemba ngan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi yang Dikelola	859.43	KM	2.913.000.000	
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0	KM	150.000.000	a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0	KM	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43	KM	2.500.000.000	b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tema nggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43	KM	2.500.000.000	
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung		1	Kegiatan	100.000.000	c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	3	Lembaga	100.000.000	
							d.	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Tema nggung	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2	Dokumen	163.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
C.	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						C.	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
1.	Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah SPAM yang Dibangun dan Dibina			275.000.000	1.	Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah SPAM yang Dibangun dan Dibina			275.000.000	
							a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Tema nggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	5	Dokumen	125.000.000	
a.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Tema nggung	Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan	1243	SR	125.000.000								
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Tema nggung	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	SR	150.000.000	b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Tema nggung	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dikelola	155.36	KM	988.000.000	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Temanggung	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dikelola	155.36	KM	1.088.000.000	
a.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	6	Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000								
b.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1	Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000	a.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1	Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000	
							b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6	Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
E.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						E.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Tema nggung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung			375.000.000	1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Tema nggung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung			2.245.000.000	
							a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuai kan	2	Bangunan Gedung	1.750.000.000	
a.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Ko ta yang Dipelihara,Dira wat, dan Diperiksa Berkala	1	Bangunan Gedung	250.000.000	b.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Ko ta yang Dipelihara,Dira wat, dan Diperiksa Berkala	1	Bangunan Gedung	370.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Tema nggung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkar an Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	80	Dokumen	125.000.000	c.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Tema nggung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkar an Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	80	Dokumen	125.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan nya di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Trotoar yang Dikelola		KM	633.000.000	1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan nya di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Trotoar yang Dikelola	75.972, 01	M	4.733.000.000	
a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Tema nggung	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1	kawasan	633.000.000								
							a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tema nggung		75.972, 01	M	4.733.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
G.	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN						G.	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN						
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang Dikelola	650.476	KM	12.560.000.000	1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang Dikelola	650.476	KM	20.060.000.000	
							a.	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Tema nggung	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen	100.000.000	
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Tema nggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelengga raan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	Dokumen	200.000.000	b.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Tema nggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelengga raan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	Dokumen	100.000.000	
b.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650.476	KM	150.000.000	c.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650.476	KM	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20	KM	5.500.000.000	d.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	100	KM	8.000.000.000	
d.	Rehabilitasi Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.45	KM	2.258.000.000	e.	Rehabilitasi Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.15	KM	4.258.000.000	
e.	Rekonstruksi Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.10	KM	1.443.000.000	f.	Rekonstruksi Jalan	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.2	KM	4.443.000.000	
f.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Tema nggung	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2	Jembatan	200.000.000	g.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Tema nggung	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2	Jembatan	200.000.000	
g.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan Kabupaten yang Dilebarkan Sesuai Standar	2.55	KM	2.809.000.000	h.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Tema nggung	Panjang Jalan Kabupaten yang Dilebarkan Sesuai Standar	0.660	Km	2.809.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Temanggung	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Konstruksi	1	Kegiatan	62.500.000	1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Temanggung	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Konstruksi	1	Kegiatan	62.500.000	
a.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Yang Dibina Dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Lembaga	62.500.000	a.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Yang Dibina Dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Lembaga	62.500.000	
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				200.000.000	1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				200.000.000	
a.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		Dokumen	200.000.000	a.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	Kegiatan	300.000.000	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	Kegiatan	600.000.000	
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000								
							a.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	600.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	12	kegiatan	150.000.000	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	12	kegiatan	150.000.000	
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Dokumen	150.000.000	a.							
							a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Dokumen	150.000.000	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.23
Usulan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				
	Pembangunan Drainase Tertutup Jalan Kyai Subkhi Parakan (M)	Kecamatan Parakan		1 Kegiatan	M
B	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Pavingisasi Trotoar Jalan Nasional Kledung-Wonosobo (M)	Kecamatan Kledung		1 Kegiatan	M

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Jalan				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Jalan				
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto (M)	Kecamatan Selopamapang		1 Kegiatan	M
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Ngabeyan - Kebonsari (M)	Kecamatan Wonobojo		1 Kegiatan	M
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Mudal - Legoksari (M)	Kecamatan Tembarak		1 Kegiatan	M
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari (M)	Kecamatan Ngadirejo		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan				
	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bejen - Prangkokan (M)	Kecamatan Bejen		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (M)	Kecamatan Kandangan		1 Kegiatan	M
	Pelebaran Jalan Menuju Standar				
	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Kebraman - Gemawang (M)	Kecamatan Gemawang		1 Kegiatan	M
	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Mungseng - Tlogomulyo (M)	Kecamatan Tlogomulyo		1 Kegiatan	M
	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Muntung - Jumprit (M)	Kecamatan Candirotto		1 Kegiatan	M
	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Lempuyang - Tretep (M)	Kecamatan Tretep		1 Kegiatan	M
	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Wanutengah - Bulu (M)	Kecamatan Bulu		1 Kegiatan	M

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.24
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOBAT BIMA	DPUPR	APBD	Sistem Informasi Peminjaman Alat Berat (Si Albert)	Mempercepat respon atas peminjaman alat berat	Peminjaman alat berat menjadi lebih efektif dan efisien	DPUPR/2022-2023
				Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan Bina Marga	Mempercepat respon atas laporan kerusakan jalan	Kerusakan jalan cepat tertangani	DPUPR/2022-2023
2	SIMTARU	DPUPR	APBD	Sistem Informasi Tata Ruang	Sistem informasi tata ruang berbasis GIS yang dapat diakses secara digital	Mempercepat informasi tentang pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku	DPUPR/2021
3	JAGA TEMAN	DPUPR	APBD	Sistem Informasi Jaringan Irigasi Temanggung	Sistem Informasi berbasis GIS yang dapat diakses secara digital dan mempercepat pelaporan kerusakan jaringan irigasi	Pengelolaan Irigasi yang lebih efisien dan tepat sasaran	DPUPR/2024-2025

2.7 Penghargaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah meraih beberapa penghargaan, antara lain:

1. Juara I PPD Tingkat Nasional; dan
2. Tiga besar terbaik se-Jawa Tengah untuk lomba kinerja petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk urusan penataan ruang.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain:

- a. Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air;

- b. Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi;
- c. Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum;
- d. Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain:

- a. Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern;
- b. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi;
- d. Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi;
- e. Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain:

- a. Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan;
- b. Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat;
- c. Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

2. Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam Preservasi jalan, Pembangunan jalan dan jembatan, Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

3. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Salah satu aspek kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yaitu kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman yang meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- b. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- c. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- d. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan (WSP)* dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;

- e. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- f. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

4. Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi:

- (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air;

- (2) Meningkatnya konektivitas jalan nasional; dan
- (3) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

B. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Permasalahan dan isu strategis tata ruang yang dikemukakan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 bersumber dari rendahnya kepastian dan ketaatan dalam penataan ruang disebabkan oleh faktor:

- 1. Tumpang tindih regulasi tata ruang;
- 2. Kewenangan tata ruang yang terbagi;
- 3. Kompleksitas sistem tata ruang;
- 4. Rendahnya kualitas substansi tata ruang;
- 5. Belum tersedianya sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 6. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap; dan
- 7. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2025-2029 adalah “Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas” dengan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum dan Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI TAHUN 2026
Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas			Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Dengan Kualitas Baik	%	66.54	71.11
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum	%	62.88	63.63
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	59.26	59.26
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	100	100
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59.02	59.02
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31.14	31.14
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31.13	31.13
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69.25	69.25

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68.63	68.63
			Persentase ketersediaan Trotoar terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10.13	10.13
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80.25	80.25
			Persentase Penerbitan PBG dan SLF terhadap Pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64.64	64.64
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89.85	89.85
			Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	94.37	94.37
			Persentase Jalan Dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22.62	22.62
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	%	100	100
	Sasaran 2: Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	%	70.2	78.58
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	%	90.38	90.38
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	%	50.01	50.01

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	%	85.70	85.75
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	%	73.85	73.9

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk urusan penataan ruang.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain:

- a. Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air;

- b. Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi;
- c. Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum;
- d. Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain:

- a. Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern;
- b. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi;
- d. Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi;
- e. Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain:

- a. Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan;
- b. Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat;
- c. Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

2. Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam Preservasi jalan, Pembangunan jalan dan jembatan, Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

3. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Salah satu aspek kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yaitu kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman yang meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- b. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- c. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- d. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan (WSP)* dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;

- e. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- f. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

4. Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi:

- (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air;

- (2) Meningkatnya konektivitas jalan nasional; dan
- (3) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

B. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Permasalahan dan isu strategis tata ruang yang dikemukakan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 bersumber dari rendahnya kepastian dan ketaatan dalam penataan ruang disebabkan oleh faktor:

- 1. Tumpang tindih regulasi tata ruang;
- 2. Kewenangan tata ruang yang terbagi;
- 3. Kompleksitas sistem tata ruang;
- 4. Rendahnya kualitas substansi tata ruang;
- 5. Belum tersedianya sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 6. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap; dan
- 7. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2025-2029 adalah “Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas” dengan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum dan Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI TAHUN 2026
Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas			Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Dengan Kualitas Baik	%	66.54	71.11
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum	%	62.88	63.63
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	59.26	59.26
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	100	100
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59.02	59.02
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31.14	31.14
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31.13	31.13
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69.25	69.25

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68.63	68.63
			Persentase ketersediaan Trotoar terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10.13	10.13
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80.25	80.25
			Persentase Penerbitan PBG dan SLF terhadap Pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	64.64	64.64
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89.85	89.85
			Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	94.37	94.37
			Persentase Jalan Dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22.62	22.62
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	%	100	100
	Sasaran 2: Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	%	70.2	78.58
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	%	90.38	90.38
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	%	50.01	50.01

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	%	85.70	85.75
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	%	73.85	73.9

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.695.994.090	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44.307.803.516	14.611.809.426
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.252.494.090	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.831.303.516	578.809.426
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.474.462.090	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.474.462.090	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.474.462.090	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.474.462.090	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	(50.000.0000)
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.978.500	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	(34.978.500)
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.032.000	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.841.426	533.809.426
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.032.000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	880.841.426	523.809.426

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.000.000	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.000.000	40.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.000.000	36.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	4.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.900.000.000	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.063.000.000	163.000.000
a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	150.000.000	1	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	150.000.000	
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.750.000.000	a	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.913.000.000	163.000.000
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000	
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000	
			3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	4	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	163.000.000	63.000.000

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	275.000.000	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	275.000.000	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	
			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	125.000.000	125.000.000
1	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	125.000.000				(125.000.000)
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	988.000.000	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.088.000.000	100.000.000
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	988.000.000	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.088.000.000	100.000.000
1	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000				(300.000.000)
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000	1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000	
			2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000	400.000.000
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	375.000.000	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.245.000.000	1.870.000.000
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	375.000.000	a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.245.000.000	1.870.000.000
			1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000	1.750.000.000

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	2	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000	120.000.000
2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	125.000.000	3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	125.000.000	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	633.000.000	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.733.000.000	4.100.000.000
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	633.000.000	a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.733.000.000	4.100.000.000
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	633.000.000	1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4.733.000.000	4.100.000.000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.560.000.000	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.060.000.000	7.500.000.000
a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.560.000.000	a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.060.000.000	7.500.000.000
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	1	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000	100.000.000
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	150.000.000	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	(100.000.000)
			3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	150.000.000	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.500.000.000	4	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.000.000.000	2.500.000.000
4	Rehabilitasi Jalan	2.258.000.000	5	Rehabilitasi Jalan	4.258.000.000	2.000.000.000
5	Rekonstruksi Jalan	1.443.000.000	6	Rekonstruksi Jalan	4.443.000.000	3.000.000.000
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.0000	7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.0000	
7	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.809.000.000	8	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.809.000.000	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	62.500.000	8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	62.500.000	
a	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	62.500.000	a	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	62.500.000	
1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	62.500.000	1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	62.500.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	650.000.000	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950.000.000	300.000.000
a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.000	a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.000	
1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000	1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000	300.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	300,000,000				

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
			1	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	600.000.000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
			1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.000.000	
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000				
	JUMLAH	29.695.994.090			44.307.803.516	14.611.809.426

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 14.611.809.426,00-.

Tabel 4. 2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kab. Temanggung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						44.307.803.516,00							45.817.217.090,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.307.803.516,00							45.817.217.090,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						44.307.803.516,00							36.328.994.090,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.831.303.516,00						-	11.252.494.090,00	
			Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 %									
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-			12 laporan	11.831.303.516,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	ASN di Lingkungan DPUPR Kabupaten Temanggung	-	10.474.462.090,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/bulan	11.831.303.516,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	ASN di Lingkungan DPUPR Kabupaten Temanggung		10.474.462.090,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Paket	130.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 %	980.841.426,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	447.032.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	880.841.426,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		357.032.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 %	246.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	236.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-				3.063.000.000,00						-	3.063.000.000,00	
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota				59,26 %									
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	-			3 unit	150.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dikelola	-			859,43 Km	2.913.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	2.913.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				859,43 KM	2.500.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				3 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	163.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		163.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						275.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan				59,02 %									
			Rumah Tangga engan Akses Air Minum Aman				31,14 %									
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan				31,13 %									
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari				100%									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum	-			234911 SR	275.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-				1.088.000.000,00						-	1.088.000.000,00	
			Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik				69,25 %									
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola	-			155,36 Km	1.088.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.088.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	688.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		688.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				6 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						2.245.000.000,00						-	1.375.000.000,00	
			Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik				80,25 %									
			Persentase Penerbitan PBG dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG				64,64 %									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota	-			3 Bangunan Gedung	2.245.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	1.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	1.7500.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	370.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				80 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						4.733.000.000,00						-	15.407.431.000,00	
			Persentase Trotoar Kondisi Baik				68,63 %									
			Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten				10,13 %									
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang trotoar yang dikelola	-			75.972,01 m	4.733.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	15.407.431.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			0				0 0	4.733.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		15.407.431.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						20.060.000.000,00						-	12.518.792.000,00	
			Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota				89,85 %									
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik				94,37 %									
			Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan				22,62 %									
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jembatan yang dikelola Panjang jalan yang dikelola	-			650,476 Km	20.060.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	12.518.792.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan														
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				650,476 KM	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				100 KM	8.000.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1,15 KM	4.258.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.534.396.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1,2 KM	4.443.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		1.534.396.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	200.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,660 KM	2.809.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						62.500.000,00						-	62.500.000,00	
			Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina				100 %									
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah lembaga jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	-			30 lembaga	62.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	62.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	62.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		62.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						950.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang				90,38 %									
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan				50,01 %									
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-			12 kegiatan	600.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	-			12 kegiatan	150.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							44.307.803.516,00							45.817.217.090,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja operasional sebesar 96,10% dan realisasi belanja modal sebesar 94,07%. Realisasi belanja operasional sebesar Rp. 34.403.477.373,00 dan belanja modal sebesar Rp. 39.070.651.268,00 dengan anggaran sebesar Rp. 77.327.911.776,00 sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I

terdiri dari belanja operasional sebesar 5,49%, realisasi belanja modal masih 0%, belanja operasional sebesar Rp. 1.869.996.280,00 dan belanja modal belum terealisasi di semester I Tahun 2025.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 44.307.803.516,00 yang terdiri dari 9 program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005